

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan badan-badan pemerintahan saat ini sangat diperdulikan jika dibandingkan dengan periode lalu. Undang-undang No 22 tahun 1999 yang sekarang direvisi menjadi Undang-undang No 32 tahun 2003 pemerintah daerah diberi tugas dari pemerintah pusat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan yang mana menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih meningkatkan transparansi yaitu bersifat jujur dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan, sehingga menjadikan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Standar akuntansi diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi yang bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi adalah pedoman yang diciptakan untuk membantu orang-orang yang bekerja dibidang akuntansi sehingga memudahkan para pembaca laporan keuangan dan menjadikan laporan keuangan tersebut bermanfaat.

Setyani dan Syafitri (2012) menemukan bahwa usia, kekayaan pemerintah daerah, ukuran legislatif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, dan *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh negatif signifikan sedangkan, ukuran pemerintah daerah,

diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Khasanah (2014), hanya total aset berpengaruh positif dan signifikan sedangkan jumlah SKPD mempunyai pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan kekayaan, tingkat ketergantungan, umur pemda, ukuran legislatif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Ghaniyyu dan Mahmud (2015) menemukan bahwa *size* mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, umur pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif signifikan, temuan audit mempunyai pengaruh positif tidak signifikan, *leverage* mempunyai pengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Hudoyo dan Mahmud (2014) menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negative tidak signifikan, pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif signifikan dan *leverage* mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di internet.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengindikasikan bahwa terdapat empat variabel independen yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pelaporan

keuangan yaitu , *age*, kekayaan pemda, ukuran legislative yang mana ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh positif signifikan sedangkan *intergovernmental reevenue* mempunyai pengaruh negatif signifikan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Waliyyani (2015) yang mengatakan bahwa *intergovernmental reevenue* berpengaruh negatif tidak signifikan. Khasanah (2014) mengindikasikan bahwa hanya total aset dan jumlah SKPD yang berpengaruh signifikan yang mana total aset mempunyai pengaruh positif signifikan sedangkan jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda, umur pemda mempunyai pengaruh negative tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, kekayaan pemda mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan (tidak berpengaruh), dan ukuran legislatif mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Hudoyo (2014) mengatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemda di Internet. Dengan hasil yang bertentangan atau tidak konsisten tersebut perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai yang mengenai karakteristik Pemda yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Eksperimen ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Setyani dan Syafitri (2012), Khasanah (2014), Hudoyo (2014), Waliyyani (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum adanya penambahan variabel independen yaitu *leverage* serta tahun dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul :  
Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada  
LHP/LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah ukuran legislatif Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah umur administratif berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah differensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
7. Apakah rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
8. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
9. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Pemaparan rumusan masalah diatas maka eksperimen ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh ukuran pemda, ukuran legislative, usia, kekayaan, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan, *intergovernmental revenue*, *leverage* pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

#### 1. Untuk Pelajar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam evaluasi tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlakun.